

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SISTEM GANDA  
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Dedy H. Karwan, Hasan Hariri dan Riswanti Rini**

FKIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1

*e-mail: dhkarwan@yahoo.co.id*

***Abstract: Implementation of Dual System Education in Public Vocational High Schools in Bandar Lampung City.** This study aims to analyze the issues of dual system education in public vocational high schools (SMKN 1 and SMKN 4) Bandar Lampung focusing on the quality of dual system education management implementation through qualitative research approach. Research results show that both schools have already performed management functions including planning, implementation, and evaluation. However, the implementation phase in business and industry experienced several problems to be solved by coordination during industry work practices. Therefore, in order for quality and relevance of the public vocational high school graduates through dual system education can be achieved, the vocational high schools in Bandar Lampung need to build intensive cooperation among the stakeholders as partners in implementing dual system education.*

***Keywords :** management, dual system education, quality of graduates*

**Abstrak: Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (Dual System) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Bandar Lampung.** Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah PSG di SMKN 1 dan SMKN 4 Bandar Lampung dengan berfokus pada kualitas implementasi manajemen PSG dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sekolah tersebut sudah melakukan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akan tetapi, pada tahap pelaksanaan di dunia usaha dan industri, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dikoordinasikan pada saat praktek kerja industri. Oleh karena itu, agar mutu dan relevansi tamatan SMK melalui PSG SMK dapat terwujud, SMK di Bandar Lampung masih memerlukan kerjasama secara intensif bersama pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai mitra dalam implementasi PSG.

**Kata kunci:** manajemen, pendidikan sistem ganda, kualitas lulusan

## PENDAHULUAN

Penyiapan sumber daya manusia berkualitas merupakan prioritas tugas pemerintah yang utama untuk kemandirian dan daya saing bangsa, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang dimulai pada tahun 2015. Hal ini bercirikan perkembangan ekonomi yang cepat yang mengarah kepada tuntutan yang lebih besar akan keterampilan (Hummelsheim & Baur, 2014).

Dalam mengantisipasi persaingan tenaga kerja tingkat menengah, pemerintah dan masyarakat melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU), baik melalui Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah, program kesetaraan Paket C melalui Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 mengupayakan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 69% pada tahun 2009 menjadi 97% pada tahun 2020. Agar dapat lebih fokus, secara operasional implementasi kebijakan tersebut didukung dengan program ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas dan relevansi, kesetaraan dan keterjaminan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat sinergis dalam penyelenggaraannya. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah sampai dengan tahun 2014 Propinsi Lampung masih harus terus ditingkatkan terutama pada SMK melalui program keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) yang implementasinya dengan PSG (*dual system*). Implementasi PSG pada SMK di Indonesia masih memerlukan perbaikan secara komprehensif.

Menurut Djoyonegoro (1998:52), program pendidikan menengah kejuruan cenderung berorientasi pada pengajaran mata pelajaran, dan tidak berfokus pada pencapaian kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, oleh karenanya manajemen pembelajaran SMK masih perlu diperbaiki. Manajemen pembelajaran perlu

meningkatkan kemitraan bersama institusi pasangan sehingga semua pemangku kepentingan dapat berperan secara optimal menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya dan siap memasuki lapangan kerja.

Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, APK Pendidikan Menengah Propinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 63,51%, dan APK Nasional mencapai 76,4%. Untuk mencapai APK 97% pada tahun 2020 diperlukan kebijakan pemerintah propinsi/kabupaten/kota di Propinsi Lampung dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta *monitoring* dengan sebaik-baiknya. Selain itu, berdasarkan ujian nasional tahun 2014, nilai rata-rata SMK di Propinsi Lampung berada diposisi bawah dari beberapa propinsi lain di luar Jawa secara nasional.

Dengan demikian, masih sangat diperlukan penelitian tentang penyempurnaan manajemen penyelenggaraan PSG di SMK Propinsi Lampung untuk memacu ketertinggalannya secara nasional baik dari sisi kuantitas, kualitas dan daya saing dengan fokus dan lokasi SMK Negeri di Kota Bandar Lampung.

## Manajemen Pendidikan Sistem Ganda (PSG)

Implementasi manajemen PSG SMK mengikuti prinsip dan karakteristik pendidikan kejuruan. Menurut Prosser dan Quigley (1950) yang dikutip oleh Karwan (2012), beberapa prinsip pendidikan kejuruan dalam pembinaan dan pengembangannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.
2. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan apabila tugas-tugas latihan

- dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan ditempat kerja.
3. Pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
  4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu mengembangkan minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.
  5. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar. Berdasarkan Prinsip ekonomi *supply-demand*, program keahlian yang dibuka disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga memenuhi permintaan pasar kerja.
  6. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).
  7. Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu pekerjaan tertentu adalah dari pengalaman para ahli bidang pekerjaan tersebut.
  8. Setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi (*body of content*) yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
  9. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan
  10. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut.
  11. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika luwes.
  12. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.
  13. Pembukaan pendidikan kejuruan membutuhkan dana sangat besar untuk mendapatkan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan industri.
- Pendidikan kejuruan dikembangkan dari terjemahan konsep *vocational education* (pendidikan kejuruan) dan *occupational education* (pendidikan keduniakerjaan), keduanya termasuk dalam pendidikan untuk menghasilkan lulusan untuk bekerja maupun teknisi industri. Henry dan Thompson mendefinisikan pendidikan kejuruan dalam Berg (2002:45) sebagai berikut:
- Vocational education is "learning how to work", vocational education has been an effort to improve technical competence and to raise an individual's position in society through mastering his environment with technology. Additionally, vocational education is geared to the needs of the job market and thus is often seen as contribution to national economic strength.*
- Intisari dari pendapat Berg bahwa pendidikan kejuruan itu identik dengan belajar bagaimana untuk bekerja, pendidikan kejuruan berupaya meningkatkan teknik dan posisi seseorang dilingkungannya melalui penguasaan teknologi dan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan kebutuhan pasar kerja dan karena itu sering dipandang sebagai sesuatu yang memberikan kontribusi yang kuat terhadap ekonomi nasional.
- Sementara Gasskov (2000:5) mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai fungsi pendidikan kejuruan untuk menyiapkan pondasi dan keterampilan khusus pada seseorang,

mengembangkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, membantu mereka bekerja produktif dan adaptif dalam kondisi dan tugas-tugas dengan teknologi yang berbeda.

Meski terdapat pengertian manajemen atau administrasi yang beragam dari L. Gullick, Henry Fayol, Kathryn. M. Bartol dan David C. Martin, Harold Koontz dan Cyril O' Donnel yang dikutip oleh Nawawi (1992) baik yang bersifat umum maupun khusus tentang kependidikan, namun secara esensial dapat ditarik benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan, bahwa: (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; (3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu; dan (4) manajemen pendidikan memiliki tiga proses utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sesuai dengan karakteristik SMK yang sistem pembelajarannya menerapkan sistem ganda (*dual system*), maka sistem manajemen kemitraan (*partnership manajemen system*) juga merupakan sistem yang tepat untuk pembinaan dan penyelenggaraannya, dimana menurut Karwan (2012: 203) terdapat 4 (empat) karakteristik dalam sistem manajemen kemitraan, yaitu:

- 1) Berorientasi pada kebutuhan pelanggan (*demand driven*).
- 2) Pengambilan keputusan strategis secara bersama (*participative decision making process*).
- 3) Menerapkan *win-win solution* dalam menetapkan standar operasi prosedur dan sasaran.
- 4) Memiliki beberapa kelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan tujuan yang sama terkait dengan suatu pekerjaan.

Menurut Djoyonegoro (1998: 78). PSG pada dasarnya mengandung dua prinsip utama, yaitu:

- 1) Program pendidikan kejuruan pada SMK adalah program bersama antara SMK dengan industri/perusahaan pasangannya. Prinsip ini merupakan konkritisasi peralihan dari supply driven ke demand driven. Peralihan dalam arti kewenangan dan tanggung jawab secara sepihak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kearah kebersamaan dan tanggung jawab bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan kejuruan.
- 2) Program pendidikan kejuruan dilakukan di dua tempat, sebagian program yaitu teori dan praktek dasar kejuruan dilaksanakan di sekolah, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keahlian produktif yang diperoleh melalui kegiatan bekerja di dunia kerja. Pola penyelenggaraan di dua tempat ini memastikan SMK mendekati dunianya (dunia sekolah) ke dunia kerja, menyesuaikan isi dengan kebutuhan dunia kerja yang akan mempermudah transfer nilai-nilai dan perilaku kerja sebagaimana yang berlaku di dunia kerja. Alhasil, karakteristik PSG sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan, harus didukung oleh beberapa faktor yang menjadi komponen-komponennya, antara lain: institusi pasangan, program pendidikan dan pelatihan bersama dengan standarnya, kelembagaan kerjasama, nilai tambah dan jaminan keterlaksanaannya secara terus menerus (*sustainability*) serta strategi pengembangannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang implementasi manajemen PSG ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, diambil dari kajian teori dan dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985: 198)

yang menerangkan bahwa: “Pendekatan kualitatif menjadi hal yang utamadalam paradigma naturalistik bukan karena paradigma ini anti kuantitatif melainkan karena pendekatan kualitatif lebih menghendaki manusia sebagai instrumen”.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985: 199) yang menyatakan bahwa:

“... *the human as instrument is inclined toward methods that are extensions of normal human activities: looking, listening, speaking, reading, and the like.*”.

Suatu penelitian kualitatif dinyatakan memperoleh tingkat kepercayaan apabila memiliki derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Miles and Huberman. 1992).

Dengan demikian penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini mencoba memahami kajian aplikasi teori dan konsep dalam merumuskan pemahaman terhadap fokus penelitian, dalam memahami bagaimana implementasi manajemen PSG di SMK Bandar Lampung. Diharapkan akan diperoleh aspek substansial dan prosedural yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan sistem manajemen yang ideal berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian mengenai implementasi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian) dalam implementasi manajemen PSG ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif eksplanatori.

Proses kajian ini diawali dengan melakukan eksplorasi pada aspek manajemen (perencanaan, pelaksanaan, capaian) yang termasuk ke dalam PSG melalui pendidikan disekolah dan praktek di industri atau perusahaan. Dalam proses eksplorasi ini akan diungkap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, capaian, permasalahan atau kendala, latar tempat PSG, proses perencanaan, pelaksanaan dan capaian dalam implementasi manajemen PSG. Seluruh

data dan informasi diharapkan dapat terekam secara baik. Oleh karena itu, instrumen pedoman observasi, pedoman wawancara, inventori, serta peralatan dalam bentuk video/audio recorder dan catatan-catatan perlu digunakan.

Proses eksplorasi selanjutnya diikuti dengan proses triangulasi data dan informasi. Dalam proses ini, data dan informasi yang tidak akurat akan direduksi. Sebaliknya, data dan informasi yang akurat dan memiliki makna yang koheren dengan konteks kajian akan ditelusur hingga mendalam. Setelah data/informasi melalui proses triangulasi, kemudian dilakukan analisis data dan informasi untuk ditemukan makna-makna yang koheren dengan konteks kajian. Selanjutnya dilakukan proses eksplanasi atas fenomena konteks berdasarkan temuan-temuan yang bermakna.

Proses berikutnya ialah melakukan konfirmasi hasil temuan pada sumber data dan informasi. Dalam hal ini, sumber data dan informasi yang akan diminta konfirmasinya ialah kepala sekolah, wakil kepala sekolah sebagai pokja kurikulum dan pokja praktek kerja industri, komite/majelis sekolah. Konfirmasi ini dimaksudkan untuk memantapkan kembali temuan yang telah diperoleh. Tujuannya ialah untuk memberikan penegasan apakah fenomena yang terungkap merupakan fenomena yang dominan (memiliki makna bagi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan capaian PSG. Akhir dari proses kajian ini ialah menyusun laporan.

### **Data dan Sumber Data Penelitian**

Data yang akan dikumpulkan berupa: 1) data dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan capaian kegiatan; 2) kondisi/situasi tempat kerja pimpinan, 3) fasilitas proses perencanaan, pelaksanaan dan bentuk capaian; dan 4) suasana/ proses perencanaan, pelaksanaan yang sedang berlangsung. Teknik ini secara keseluruhan disajikan dalam bentuk gambar berikut ini.



Gambar 1 Proses pelaksanaan metode kualitatif eksplanatori.

Pada mulanya, data diperoleh di lapangan melalui proses wawancara, observasi, pengisian inventori, dan perekaman video. Setelah melalui proses triangulasi data dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi diantara informan satu dengan lainnya, diperoleh data/informasi yang telah tereduksi. Tahap pertama analisis yang peneliti akan dilakukan adalah analisis komponensial. Dalam proses ini dilakukan pengelompokan topik/tema (kategorisasi) menurut aspek yang diamati. Selanjutnya, hasil analisis komponensial ini dipadukan dalam tema yang lebih umum terkait dengan konteks kajian, yaitu kualitas aspek dari implementasi manajemen PSG. Fenomena ini kemudian dipaparkan secara naratif yang merupakan eksplanasi fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu implementasi manajemen PSG di SMK. Sebagai sekolah rujukan di Bandar Lampung, PSG ini akan diuraikan secara lengkap dari berbagai model perencanaan implementasi manajemen PSG yang telah dilakukan dengan kondisi dan berbagai perubahan kebijakan.

Sementara itu, program PSG harus tetap dilaksanakan secara terus untuk meningkatkan kualitasnya untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap bekerja sesuai bidang keahliannya dan memiliki daya saing. Program ini melibatkan berbagai instansi dari tingkat pusat hingga daerah.

Dari perolehan data di semua SMK tempat penelitian bahwa implementasi PSG diselenggarakan dengan manajemen dan struktur organisasi yang sama, termasuk 2 (dua) SMK (SMKN 1 and SMKN 4) Bandar Lampung yang menjadi obyek penelitian ini.

Hal yang penting adalah bahwa belajar melalui partisipasi aktif dan keterlibatan dalam pendidikan dan tempat kerja merupakan prasyarat untuk pengembangan kompetensi profesional yang efektif (Sappa, Choy, & Aprea, 2016).

## Perencanaan Pendidikan Sistem Ganda

Tahap persiapan yang dilakukan oleh kelompok kerja kurikulum dan kelompok kerja praktek kerja industri dengan program umum meliputi penjadwalan, identifikasi kesesuaian program terhadap praktek keahlian serta tempat praktek kerja industri, kerjasama dengan institusi pasangan baru, validasi dan sinkronisasi kompetensi dengan jenis pekerjaan di industri atau dunia usaha, kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Hal-hal tersebut dilakukan oleh semua SMK rujukan yang berdasarkan peraturan terdahulu disebut rintisan SMK berstandar internasional.

## Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda

Tujuan pengembangan kegiatan, indikator capaian tujuan dan acuan yang digunakan sebagai informasi pencapaian tujuan program diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pola Program Penjaminan Mutu

<b>Tujuan pengembangan kegiatan</b>	<b>Indikator pencapaian tujuan</b>	<b>Acuan sebagai informasi pencapaian tujuan</b>
<b>Meningkatkan kualitas dan kinerja sekolah dengan Institusi pasangan</b>	Jumlah Institusi pasangan yang melaksanakan PSG dengan SMK meningkat	Berbasis tahunan pada program tahun tahunan sekolah
<b>Sasaran Kesesuaian program keahlian</b>	Indikator Pencapaian Sasaran seauai rencana tahunan	Acuan dalam Memonitor Pencapaian Sasaran baik jumlah dan kualitas
<b>Penguatan kapasitas Insitusi Pasanganguna peningkatan kualitas PSG</b>	Jumlah program keahlian dan jumlah Insitusi pasangan	Kemajuan keterlibatan pokja dapat lebih efektif dan efisien
<b>Penguatan kapasitas Pokja Kurikulum dan Pokja Prakerin dalam pengembangan program sinkronisasi PSG</b>	Jumlah guru sesuai program studi	Meningkatnya fungsi pokja disekolah yang dapat mengevaluasi PSG
<b>Kerangka kerja yang terpadu untuk meningkatkan akuntabilitas dan sistem insentif peserta PSG</b>	Kebijakan, prosedur dan instrumen baru untuk pembinaan dan promosi sekolah	Pokja-pokja ( <i>task force</i> ) memanfaatkan masukan dari aktifitas pemantauan berbagai studi, seminar, dan uji coba untuk memodifikasi dan memperbaiki kebijakan, prosedur, instrumen, dan rencana; serta melaporkannya kepada komite sekolah dan kepala sekolah ( <i>steering committee</i> )
<b>Hasil PSG sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan</b>	Database peserta PSG sesuai program keahlian dan insitusi pasangan	Database siswa PSG dalam program penelusuran lulusan

Pada implementasi sistem manajemen peningkatan mutu guru, sasaran pelaksanaan dan pengembangannya adalah untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan kinerja guru melalui peningkatan penguasaan materi pembelajaran dan keterampilan mengajar di kelas. Program ini dikembangkan dalam

kerangka kerja kualitas pendidikan yang menyeluruh.

Indikator kunci untuk mengukur peningkatan kualitas dan kinerja sekolah dalam mengimplementasikan manajemen PSG adalah:

- 1) Peningkatan jumlah institusi pasangan yang relevan dengan programkeahlian di SMK,

Peningkatan jumlah guru dan siswa dalam pelaksanaan di insitusi pasangan,

- 2) Jumlah siswa yang mendapat nilai uji kompetensi yang dilaksanakan oleh insitusi pasangan menurun.

Sasaran di atas dapat dicapai melalui inisiasi reformasi kebijakan dasar dalam perluasan kerjasama sekolah dan industri atau dunia usaha terus dikembangkan dengan solusi kemanfaatannya atau insentif yang diperoleh oleh semua yang terkait dengan implementasi PSG.

Pelaksanaan pemberian dana insentif pengembangan implementasi PSG dapat disepakati apabila semua anggota pokja, manajmen sekolah dan majelis sekolah serta insitusi pasangan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kompetensi lulusan SMK serta didukung dengan regulasi dan *win-win strategy*. Dari hasil pengumpulan data, implementasi PSG sangat menentukan mutu pelaksanaan PSG terutama pada kualitas tamatan sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Penilaian dan pelaporan dari rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan tindakan korektif guna penyempurnaan kegiatan PSG selanjutnya.

Pada evaluasi PSG di SMK tersebut, unsur yang terlibat adalah seluruh kelompok kerja yang terdapat pada struktur organisasi sekolah, pokja humas, kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah.

Penilaian yang dilakukan merupakan salah satu indikator berhasil tidaknya kegiatan PSG, penilaian ditinjau dari 2 (dua) aspek yang pertama dari pokja-pokja. Sedangkan aspek yang kedua adalah dari peserta PSG di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan insitusi pasangan, didapatkan temuan-temuan yang berkaitan dengan partisipasi Insitusi pasangandalam praktek kerja lapangan PSG pada siswa kompetensi keahlian

akuntansi. Adapun temuan-temuan yang didapat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi insitusi pasangan dalam menumbuhkan budaya profesi untuk program keahlian akuntansi yang baik telah dilaksanakan oleh dunia usaha dan industri. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada komite sekolah/insitusi pasangan ditemukan bahwa sebagian insitusi pasangan telah menunjukkan budaya profesi akuntansi yang baik pada siswa. Insitusi pasangan tersebut telah menempatkan siswa pada bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian siswa dan memberikan tugas yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Sedangkan sebagian insitusi pasangan lainnya, belum dapat menumbuhkan budaya profesi akuntansi yang baik pada siswa kompetensi keahlian akuntansi. Penempatan siswa oleh insitusi pasangan tidaksesuai dengan kompetensi keahlian siswa. Jadi, siswa hanya ditunjukan dan dijelaskan tentang budaya profesi yang sesuai dengan bidang kerja pembimbing saja.
- 2) Partisipasi insitusi pasangan dalam melakukan evaluasi pendidikan akuntansi, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan pada komite sekolah/insitusi pasangan, diketahui bahwa semua insitusi pasangan tidak melakukan tes dalam melakukan evaluasi. Siswa hanya dievaluasi dari kegiatan sehari-hari selama siswa melakukan prakerin di insitusi pasangan tersebut. Sedangkan sebagian dari insitusi pasangan telah melakukan evaluasi pendidikan yang sesuai dengan kompetensi keahlian siswa. Hanya sedikit siswa telah diberikan tugas yang sesuai dengan kompetensi keahlian siswa dan disetiap akhir

dari pelaksanaan tugas tersebut, karena siswa langsung dievaluasi dan dilakukan perbaikan yang dibimbing oleh pembimbing di institusi pasangan.

Sedangkan hampir separuh institusi pasangan lainnya sama sekali tidak melakukan evaluasi pendidikan pada siswa. Hal ini dikarenakan mereka memang tidak menyiapkan data yang lengkap untuk mengevaluasi atau melakukan tes pada siswa. Selain karena bidang kerja mereka yang memang tidak berkaitan atau tidak relevan, mereka juga secara umum hanya melakukan evaluasi berdasarkan sikapnya.

### **Pemantauan Evaluasi dan Penjaminan Mutu**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi manajemen PSG, ternyata masih banyak terkendala dengan terbitnya regulasi di era otonomi pengelolaan pendidikan, sehingga sistem pendidikan kejuruan yang handal dengan manajemen yang tangguh, luwes, adaptif dan antisipatif mengalami banyak kendala dalam implementasinya.

Pada beberapa program kegiatan di Sekolah Menengah Kejuruan masih terdapat konsep pendidikan kejuruan yang konvensional yang dapat digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

#### *1) Supply-driven*

Pendidikan yang dilakukan sekolah kurang berorientasi masa depan tamatan.

#### *2) School-based program*

Beberapa program dan kegiatan tidak dirancang bersama *stakeholder*

#### *3) Tidak ada recognition prior learning*

Sekolah sebagai institusi pendidikan kurang menghargai pengalaman dan hasil pembelajaran di luar sekolah

#### *4) Guru kejuruan yang tidak berpengalaman industri.*

#### *5) Pendidikan dipersepsikan hanya merupakan*

tanggung jawab pemerintah sehingga sekolah merasa paling bisa tanpa melihat keperluan sumberdaya manusia yang dibutuhkan *stakeholder*.

### **Kualitas Perencanaan**

Perencanaan merupakan fungsi dasar atau fungsi fundamental. Perencanaan ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dampak perencanaan baru terasa pada masa yang akan datang agar resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya segala kegiatan, tindakan, kebijaksanaan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan merupakan proses menetapkan keputusan mengenai pekerjaan/ kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dimasa depan yang terarah pada suatu tujuan tertentu.

Menurut paparan hasil wawancara ketua PSG tentang siapa yang merencanakan PSG adalah sebagai berikut: PSG sendiri merupakan program nasional berdasarkan kurikulum dari Dikmenjur SMK. Program PSG terdapat pada kurikulum dan silabus pada masing-masing kompetensi keahlian yang dijabarkan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar yang belum dicapai pada saat pembelajaran di sekolah.

Jadi, masing-masing kompetensi keahlian yang mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus mereka capai atau pelajari di Dunia Usaha/Industri.

Sebagaimana telah disampaikan wakil kepala sekolah hubungan masyarakat tentang tahapan-tahapan perencanaan PSG yaitu: *Pertama*, tim sekolah membentuk kelompok kerja, dimana tim tersebut disebut sebagai kelompok kerja yang terlibat langsung PSG. *Kedua*, tim melaksanakan perencanaan dengan pihak sekolah dan masing masing jurusan atau bidang keahlian yang ada dan berapa siswa yang ada, dan kemudian pihak yang bersangkutan

menentukan dimana ditempatkan siswa/i untuk melaksanakan PSG. *Ketiga*, melakukan peninjauan, pembekalan, pengantaran sehingga mereka dapat dilepas langsung ke dunia usaha yang setiap sebulan sekali dilakukan monitoring.

Data hasil penelitian, tahapan-tahapan perencanaan PSG diawali dengan rapat yang dilakukan oleh pihak komite sekolah selaku perwakilan dari orangtua dan pihak wakil kepala dan koordinator yang berada di struktur organisasi tentang rencana anggaran biaya PSG dan seberapa besar para siswa berpartisipasi dalam mengeluarkan dana untuk pelaksanaan PSG dan cara pembayaran sumbangan PSG tersebut.

Kepala Sekolah melibatkan koordinator humas untuk berkoordinasi tentang struktur organisasi PSG. Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik menghasilkan suatu rencana yang baik dengan memperhatikan syarat-syarat perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan temuan penelitian, yang terlibat dalam perencanaan PSG meliputi komite sekolah, kepala sekolah, koordinator kurikulum, kesiswaan, humas dan industri serta guru yang terdapat pada struktur organisasi dan ketua kompetensi keahlian. Telah diuraikan tentang siapa yang terlibat pada perencanaan PSG adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, koordinator humas sebagai petugas monitoring atau mengkoordinir kelompok kerja prakerin, kelompok kerja kurikulum yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan di dalamnya juga terdapat ketua program keahlian dari masing masing bidang.

Oleh karenanya perencanaan harus melibatkan seluruh aspek yang mempengaruhi secara langsung pelaksanaan PSG, baik orangtua melalui komite sekolah, perwakilan dunia usaha dan industri, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, humas dan industri, ketua program keahlian serta guru

produktif didalamnya sekaligus siswa sendiri sebagai pelakunya.

Masing-masing kelompok kerja disekolah bekerja sesuai dengan job deskripsi masing-masing. Ketua program keahlian melakukan pemetaan terhadap siswa yang melakukan PSG berdasarkan kemampuan, dunia usaha dan industri, serta ijin orangtua bagi yang melaksanakan PSG di luar kota. Peninjauan tempat PSG dilakukan oleh guru-guru produktif karena mengerti standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dicapai di sekolah. Kelompok kerja prakerin/PSG melakukan pembekalan selama 3 hari, narasumbernya adalah kepala sekolah, guru, dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan materi yang berisi sikap dan gambaran situasi lingkungan dunia usaha dan industri. Petugas mengantar siswa untuk melaksanakan PSG ditetapkan berdasarkan wilayah, sedangkan pelaksanaan monitoring dan penarikan siswa PSG dilakukan oleh pokja prakerin.

Keuntungan dalam perencanaan yang baik mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Program PSG terdapat pada silabus masing-masing kompetensi keahlian, dimana SK/KD yang belum bisa diajarkan karena sarana/prasarana yang belum memadai sesuai dengan tuntutan pasar industri yang siswa harus dapatkan. Oleh karena itu, para siswa melakukan praktik di luar (dunia usaha/industri) untuk memenuhi ketertinggalan kompetensi yang mereka harus dapatkan.

Penyusunan perencanaan PSG di SMK Negeri memiliki standar operasional prosedur untuk meningkatkan sistem administrasi bagi kelompok kerja PSG. Komponen-komponen yang dilibatkan dari sekolah adalah wakil kepala sekolah humas dan industri, kurikulum, kesiswaan dan tidak kalah pentingnya adalah kompetensi

keahlian itu sendiri. Perencanaan PSG belum melibatkan dari dunia usaha/dunia industri dan siswa sebagai peserta PSG. Pendanaan PSG merupakan swakelola dari sekolah yang diambil dari komite/majelis sekolah dengan pembayaran diangsur.

Besar dana yang dikumpulkan berdasarkan rapat komite sekolah dengan pihak sekolah menentukan berapa dana partisipasi orangtua untuk PSG pada tahun ajaran baru. Sumber dana tidak hanya dari siswa semata, bantuan dari pemerintah dilakukan dengan dana BOS untuk kegiatan yang relevan. Semua sekolah sudah mempunyai bengkel serta laboratorium masing-masing serta alat penunjang dan keselamatan kerja yang sesuai standar, operasi dan prosedur, hanya jumlahnya beberapa jurusan belum sesuai dengan jumlah peserta didik. Serta beberapa peralatan praktek yang harganya mahal belum bisa di penuhi oleh sekolah seperti tuntutan dari dunia usaha/dunia industri.

Penguasaan kompetensi dilakukan melalui pembelajaran di sekolah dan dunia kerja mitra dengan rancangan pembelajaran oleh sekolah dan industri. Oleh karena itu, diharapkan setiap kompetensi keahlian yang menurunkan siswa ke dunia usaha dan industri mempunyai bekal yang cukup atau sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan di tempat PSG. Demikian halnya kenyataannya dalam menempatkan siswa masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi yang akan dilaksanakan di dunia usaha dan industri.

Proses dan produk (hasil) evaluasi merupakan bagian terakhir dalam proses kegiatan pendidikan sistem ganda dimana berfungsi mengukur pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Pada penilaian pihak dunia usaha/dunia industri belum ada bentuk penilaian yang terstruktur bagi peserta.

Peserta PSG hanya mendapatkan jurnal atau kertas penilaian dari sekolah, oleh karena itu pihak sekolah belum bisa memberikan *reward* yang jelas bagi peserta PSG yang berhasil dan

mengharumkan nama baik sekolah pada dunia usaha/industri.

### **Kualitas Pelaksanaan**

Sebagian kualitas pelaksanaan implementasi manajemen PSG sangat ditentukan oleh partisipasi institusi pasangan dalam menumbuhkan budaya profesi yang baik pada siswa sesuai program atau kompetensi keahlian.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada beberapa institusi pasangan ditemukan bahwa: Sebagian institusi pasangan telah menunjukkan budaya profesi. Dengan penempatan yang sesuai, siswa akan mendapatkan contoh budaya profesi langsung oleh pembimbing yang sehari-harinya yang berkecimpung di dunia akuntansi.

Tentunya akan banyak pengalaman yang dapat siswa serap dari pembimbing yang telah menguasai bidang tersebut, contohnya bidang akuntansi. Hal lainnya yang menjadi patokan adalah kesesuaian antara kegiatan yang sehari-hari dilakukan siswa prakerin dengan kompetensi keahlian akuntansi yang diharapkan dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan.

Dengan kegiatan yang sesuai, siswa akan langsung mempraktekkan budaya profesi akuntansi yang baik tersebut dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing. Sedangkan sebagian dari institusi pasangan lainnya yang dikategorikan tidak berpartisipasi dalam menunjukkan budaya profesi yang baik pada siswa. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari sekolah tentang kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh siswa selama prakerin dan proses penilaian yang tepat serta kurangnya pengawasan dari sekolah pada saat prakerin berlangsung.

### **Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan komite sekolah dan institusi pasangan, sebagian besar institusi pasangan tidak berpartisipasi dalam upaya merekrut tamatan,

dimana tidak adanya tawaran untuk bekerja atau ransangan dari institusi pasangan terhadap siswa agar melamar bekerja atau permintaan terhadap siswa untuk bekerja setelah lulus sekolah. Dalam hal ini, siswa harus dirangsang untuk mengembangkan keterampilan karena pengembangan keterampilan yang tepat, misalnya di bidang akuntansi, dapat memberikan kontribusi positif (Xhumari & Dibra, 2016).

Menurut Flippo (2009 :151), “perekrutan adalah proses mencari calon karyawan dan merangsang mereka untuk melamar pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan.”

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan pada institusi pasangan, penyebab tidak adanya upaya rekrutmen pada siswa kompetensi keahlian akuntansi adalah sebagai berikut:

- (a) Harus melewati tes resmi, dimana untuk menjadi pegawai negeri sipil atau karyawan di suatu perusahaan atau BUMN, siswa harus melewati tes resmi terlebih dahulu. Dengan demikian, meskipun siswa mendapat nilai bagus atau berperilaku baik selama prakerin, tidak menjamin siswa tersebut dapat langsung bekerja di institusi pasangan tersebut.
- (b) Banyak diantara institusi pasangan yang mengakui bahwa kesempatan siswa untuk bekerja di institusi pasangan tersebut masih sangat kecil, karena tamatan SMK masih belum sesuai dengan kapasitas pegawai di institusi pasangan tersebut.

Dengan demikian, sebagian besar institusi pasangan dikategorikan belum berpartisipasi dalam upaya merekrut para siswa sesuai kompetensi keahlian. Untuk memenuhi hal ini pada dasarnya dibutuhkan pendidik yang memenuhi tuntutan internasional dan standar yang tinggi (Kalieva, Arupov, Abaidullaeva, & Biyakhmetov, 2015).

## SIMPULAN

Manajemen PSG dengan konsep dan karakteristiknya seperti diuraikan diatas serta melihat hasil kajian dari 2 (dua) sekolah menengah kejuruan (SMKN 1 and SMKN 4) di Bandar Lampung saat ini masih bersifat transisional dari yang bersifat konvensional menuju pendidikan yang inovatif sehingga masih diperlukan kerja keras oleh para pengelola pendidikan sesuai dengan perkembangan dunia industri dan dunia usaha yang memerlukan tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa SMK seharusnya membina hubungan/bekerja sama dengan perguruan tinggi (Gonon, Deissinger, Mc. Cracken, & Smith, 2016). Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perencanaan PSG di SMKN tersebut masih belum optimal karena dengan beberapa perubahan regulasi yang ada, sangat memerlukan dukungan pembinaan sekolah secara kom-prehensif, baik kualitas, kuantitas maupun pendanaan.
- 2) Pelaksanaan PSG melibatkan banyak pihak sehingga diperlukan pengaturan tatacara kerjasama yang menyangkut fungsi, struktur, mekanisme kerja serta hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya melalui sosialisasi program.
- 3) Evaluasi dan sistem penjaminan mutu masih diperlukan berdasarkan naskah kerjasama secara lebih kongkrit antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri yang meliputi: tujuan pelaksanaan, model-model implementasi pelaksanaan serta jumlah peserta didik yang harus dilayani secara periodik, serta tanggung jawab masing-masing pihak dan sistem administrasi bagi penyelenggara untuk mengukur efektifitas dan efisiensinya. Penyempurnaan model PSG masih

memerlukan sosialisasi dan pengkajian lebih lanjut dalam mendukung implementasi manajemen PSG di SMK.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Berg, G.A. 2002. *Why Distance Learning? Higher Education Administrative Practices*. Amerika: Praeger Publisher.
- Djoyonegoro, W. 1998. *Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui SMK*. Jakarta: Jayakarta Agung.
- Flippo, E.B. 2009. *Manajemen Personalialia*, Jilid I. Jakarta: Erlangga
- Gasskov, V. 2000. *Managing Vocational Training System: HandBook for Senior Administrators*. Geneva: International Labour Office.
- Gonon, P., Deissinger, T., Mc. Cracken, M., & Smith, E. (2016). Stakeholders in the German and Swiss vocational educational and training system their role in innovating apprenticeships against the background of academisation. *Education Training*, 58(6).
- Hummelsheim, S., & Baur, M. 2014. The German dual system of initial vocational education and training and its potential for transfer to Asia. *Prospects*, 44(2), 279-296.
- Kalieva, S., Arupov, A., Abaidullaeva, M., & Biyakhmetov, R. 2015. Formation of new quality of preparation of qualified personnel in the Republic of Kazakhstan. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 2(2).
- Karwan, D.H. 2012. *Implementasi Sistem Manajemen Peningkatan Mutu Guru*. Bandung: SPS UPI
- Lincoln, Y.S., and Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.
- Miles and Huberman. 1992. *Qualitative data analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nawawi, H. 1992. *Supervisi dan Administrasi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Prosser, C.A. and Quigley, T.H. 1950. *Vocational Education in a Democracy*. Chicago : American Technical Society
- Sappa, V., Choy, S., & Aprea, C. (2016). Stakeholders 2 conceptions of connecting learning at different sites in two national VET systems. *Journal of Vocational Education & Training*, 1-19
- Xhumari, M., & Dibra, S. (2016). Access to the Albanian VET System: social, individual and school based barriers. *European Journal of Education*.